

KEUNGGULAN KOMPARATIF TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA: TANTANGAN BAGI INDONESIA

Annisa Nova Widyastuti¹, Shanti Darmastuti², Sindy Yulia Putri³

¹ Ilmu Hubungan Internasional, UPN 'Veteran' Jakarta, Indonesia; annisanova21@gmail.com

² Ilmu Hubungan Internasional, UPN 'Veteran' Jakarta, Indonesia

³ Ilmu Hubungan Internasional, UPN 'Veteran' Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The focus of this study is the challenges of Indonesian Textile and Textile Product (TPT) to China in the framework of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) which seen from the comparative advantage. Theoretically, ACFTA should have a positive impact for the members since there is a tariff removal to 0%. TPT is one of the industries that has a large contribution to Indonesia's trade. However, TPT from China dominates over local TPT. The purpose of this study is to find out challenges of Indonesian TPT in the ACFTA framework. This research was done by qualitatively in explanative design. The results of this study are the difficulty of obtaining raw materials, outdated production machine, the difficulty of applying Indonesia National Standard to the textile industry and high loan prime rate. These are the main challenges for Indonesian textile products. This research shows that Indonesia doesn't have the comparative advantage yet. Therefore, the strategy of the government as well as the TPT producers is needed in facing the challenges so it would improve the competitiveness of the Indonesian textile industry.

Keywords: ACFTA, TPT, Challenges

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tantangan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia terhadap Tiongkok dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang dilihat dari keunggulan komparatif. Secara teori, kerjasama ACFTA memberikan dampak positif bagi negara anggota karena adanya penghapusan tarif menjadi 0%. Industri TPT adalah salah satu industri yang berkontribusi besar pada perdagangan Indonesia. Namun, TPT asal Tiongkok lebih mendominasi daripada TPT lokal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tantangan TPT Indonesia dalam kerangka ACFTA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sulitnya memperoleh bahan baku, mesin produksi yang sudah tua, sulitnya penerapan SNI bagi industri TPT serta tingginya suku bunga kredit. Keempat hal tersebut merupakan tantangan utama bagi TPT Indonesia. Penelitian memperlihatkan industri TPT Indonesia belum memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan Tiongkok. Oleh karena itu, diperlukan strategi dari pemerintah maupun para produsen TPT dalam menghadapi tantangan sehingga dapat meningkatkan daya saing industri TPT Indonesia.

Kata Kunci: ACFTA, TPT, Tantangan

A. Pendahuluan

Perdagangan berperan penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun kawasan sehingga diperlukan adanya integrasi ekonomi melalui suatu wadah kerjasama. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), sebagai organisasi regional yang menaungi berbagai negara di Asia Tenggara memiliki berbagai agenda dalam mencapai perdamaian dan kesejahteraan. Salah satu agenda yang menjadi fokus utama ASEAN yaitu mewujudkan suatu integrasi ekonomi di kawasan.

Dalam mewujudkan agendanya, ASEAN menjalin kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Kerjasama ekonomi tersebut membuat hubungan keduanya menjadi semakin komprehensif. Sehingga pada 1 Januari 2010, *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) resmi didirikan yang bertujuan guna mewujudkan integrasi ekonomi melalui perdagangan bebas dengan mengurangi maupun menghilangkan segala macam hambatan perdagangan (kemendag.go.id, 2010) serta memajukan kerjasama perdagangan maupun investasi dua arah Tiongkok dan ASEAN (*ACFTA Business Portal*, 2016).

Dalam kerangka ACFTA, dibentuk tiga tahap penurunan maupun penghapusan tarif perdagangan (kemendag.go.id). Pertama, *Early Harvest Program* (EHP) yang dijalankan secara bertahap mulai dari 1 Januari 2004 hingga 1 Januari 2006 di mana tarif untuk produk yang masuk ke kategori EHP sudah dikenakan tarif 0%. Kedua, *Normal Track* (NT) yang terbagi menjadi NT I dan NT II. Penurunan tarif pada NT I dimulai sejak Juli 2005, diikuti oleh ASEAN-6 dan

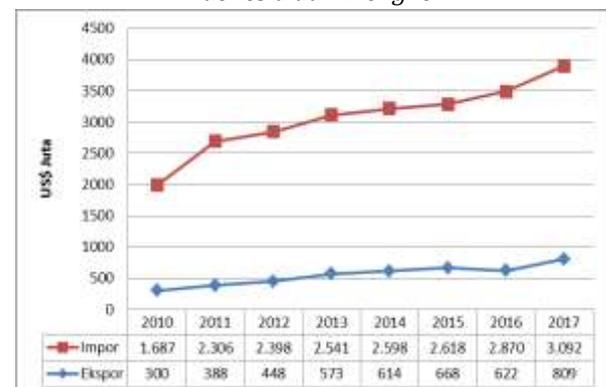
Tiongkok dan tarif tersebut pada 2010 menjadi 0%.

Sedangkan pada NT II dimulai tahun 2009 yang diikuti oleh Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam di mana keempat negara harus sudah menerapkan tarif 0%. Produk-produk yang masuk kategori NT yaitu produk dari sektor ESDM, kehutanan, maritim, TPT dan lain-lain. Kategori ketiga ialah *Sensitive Track*. Kategori ini terbagi dua, yaitu *Sensitive List* yang dimulai sejak 2012 dengan penghapusan tarif 0%-20% dan *Highly Sensitive List* yang dimulai tahun 2015 dengan penghapusan tarif sebesar 0-50%.

Paska diterapkannya penghapusan hambatan tarif menjadi 0%, Indonesia mengalami peningkatan pada ekspor TPT ke Tiongkok. Akan tetapi, jumlah impor yang masuk jauh melebihi jumlah ekspor TPT Indonesia ke Tiongkok. Jumlah tersebut meningkat secara konstan tiap tahunnya. Berikut nilai perdagangan TPT Indonesia dengan Tiongkok:

Grafik 1

Nilai Perdagangan Ekspor-Impor TPT
Indonesia dan Tiongkok



Sumber: WITS

Dari grafik di atas terlihat nilai impor TPT Tiongkok ke Indonesia jauh melampaui nilai ekspor TPT Indonesia ke Tiongkok. Pada tahun 2010, Indonesia mengekspor TPT ke Tiongkok sebesar US\$

300 juta, sedangkan impor TPT yang masuk mencapai US\$ 1,6 miliar. Terbukanya pintu perdagangan bebas telah menyebabkan banjirnya produk tekstil dari Tiongkok ke Indonesia. Hal tersebut merupakan persoalan yang serius bagi Indonesia. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tantangan yang dihadapi industri TPT Indonesia terhadap Tiongkok dalam ACFTA.

B. Kerangka Teori ***Comparative Advantage Theory***

Teori perdagangan internasional dari David Ricardo menyatakan bahwa ketika suatu komoditi dapat dikatakan keunggulan komparatifnya lebih besar, maka negara tersebut berpeluang dalam memproduksi serta mengimpornya. Sedangkan bagi komoditi yang keunggulan komparatifnya lebih kecil, maka dapat dilakukan impor (Salvatore, 1997).

Keunggulan komparatif dapat diperoleh dengan meningkatkan produktivitas suatu komoditi atau produk. Hal tersebut dilakukan oleh negara melalui pemusatan sumber daya yang dinilai berpotensi menjadi keunggulannya. *Cost comparative advantage* merupakan bagian dari keunggulan komparatif. Suatu negara memiliki produktivitas tinggi dengan menggabungkan faktor-faktor produksi. Hasilnya, negara tersebut berkesanggupan dalam menciptakan produk yang lebih baik dan juga relatif lebih murah. Oleh sebab itu, negara tersebut mendapatkan keunggulan komparatif biaya.

Selain peningkatan produktivitas melalui pemusatan sumber daya, penguasaan teknologi juga dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan negara dalam memperoleh keunggulan

komparatif. Teori keunggulan komparatif mengalami perkembangan seiring dengan hadirnya globalisasi, yakni menjadi *dynamic comparative advantage* yang menjelaskan bahwa penguasaan teknologi merupakan faktor dalam menciptakan keunggulan komparatif. Hanya mengandalkan sumber daya alam tidak cukup, maka suatu negara perlu menguasai teknologi sehingga dapat bertahan dalam persaingan global.

Teori *comparative advantage* yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keunggulan komparatif yang dimiliki oleh industri TPT Indonesia maupun Tiongkok. Sehingga, dapat memperlihatkan apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan TPT dengan Tiongkok.

Free trade adalah sistem perdagangan internasional baru bagi seluruh negara guna melangsungkan kerjasama perdagangan. Syarat yang diberikan perdagangan bebas terkait kemudahan pergerakan barang, jasa, modal dan lainnya yang melampaui batas negara (Hastedt *et.al*, 2014). Perdagangan bebas sudah dilakukan oleh berbagai negara dunia untuk membuka pasar mereka dan menjual produknya secara meluas. *Free trade* dijalankan oleh berbagai negara dengan menghapus hambatan perdagangan seperti tarif serta bertukar barang yang menjadi keunggulan negaranya.

Free Trade Area (FTA) merupakan bentuk integrasi ekonomi yang paling sederhana yakni kesepakatan beberapa negara di suatu wilayah dalam mengurangi maupun menghilangkan kendala perdagangan. Dalam menjalankan perdagangan, FTA memiliki beberapa

prinsip. Pertama, *Most Favoured Nation* (MFN) yang didefinisikan sebagai semua mitra dagang diperlakukan sama. Kedua, *National Treatment* yaitu semua negara anggota memberikan perlakuan yang sama terhadap produk lokal dan produk impor seperti yang dicakup dalam ACFTA dan *Framework Agreement* sesuai dengan Pasal III GATT 1994.

Ketiga, Penghapusan Kuota ialah pengurangan atau penghapusan tarif dari semua negara anggota berlaku pada jalur tarif yang tercantum dan akan dikurangi secara bertahap hingga dihilangkan. Keempat *Transparency*. Untuk mempermudah laju perdagangan, negara-negara anggota wajib bersifat terbuka terhadap kebijakan perdagangannya. Terakhir, *Rules of Origin*. Kriteria sebagai penetapan dalam perdagangan internasional guna menentukan status asal barang.

Penelitian ini menggunakan konsep perdagangan bebas yang bertujuan guna melihat bagaimana perdagangan bebas di ASEAN dan Tiongkok. Konsep ini penting untuk menganalisis kebijakan terkait prinsip-prinsip maupun tahapan penurunan tarif yang diterapkan dalam ACFTA dapat memengaruhi perdagangan TPT antar anggota. Sehingga, menimbulkan berbagai tantangan bagi industri TPT Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksplanatif. Pendekatan ini memiliki tujuan guna menyelidiki dan menafsirkan makna dari suatu masalah sosial (Creswell, 2009). Pada pendekatan kualitatif, dunia sosial ditafsirkan melalui suatu penelitian

sehingga dapat dipahami dengan mudah. Suatu cara dalam menganalisa tentang mengapa situasi yang ada pada suatu persoalan dalam penelitian itu terjadi didefinisikan sebagai penelitian eksplanatif (Bryman, 2012).

Data primer yang penulis gunakan yakni nilai perdagangan TPT Indonesia dengan Tiongkok, serta nilai impor bahan baku TPT Indonesia. Sedangkan data sekunder penelitian ini yaitu penurunan tarif ACFTA. Dalam memperoleh data penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia, serta menggunakan teknik studi pustaka.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan alur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada reduksi data, terdapat proses pemilihan data, penyederhanaan data sehingga mendapatkan data yang menjadi pusat perhatian. Data-data yang didapatkan menggambarkan data yang relevan dengan penelitian penulis terkait perdagangan TPT Indonesia dan Tiongkok dalam ACFTA. Setelah itu, data yang penulis peroleh secara langsung dari institusi terkait dengan data yang didapatkan melalui studi pustaka akan penulis bandingkan.

Alur kedua yaitu penyajian data yang didefinisikan sebagai susunan dari kumpulan informasi guna menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014). Data yang disajikan berbentuk narasi agar memberi kemudahan bagi penulis maupun pembaca untuk memahami tantangan yang dihadapi industri TPT Indonesia. Penarikan kesimpulan merupakan alur ketiga dimana penulis memberikan asumsi terkait

tantangan yang dihadapi TPT Indonesia yang dilihat dari *comparative advantage*. Data yang diperoleh dibandingkan dengan asumsi tersebut sehingga dapat diverifikasi kebenarannya. Setelah verifikasi tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan.

D. Hasil Dan Pembahasan

Sulitnya Memperoleh Bahan Baku TPT

Kapas merupakan salah satu serat tekstil yang menjadi bahan baku utama yang dibutuhkan pada industri TPT Indonesia. Dalam industri TPT, kapas mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki bahan baku lain meskipun serat buatan seperti polyester dan rayon semakin berkembang. Salah satu keunggulan tersebut ialah kemampuannya yang bersifat higroskopis atau mudah menyerap keringat (Hermawan, 2011). Oleh karena itu, kapas menjadi komponen tekstil yang paling penting serta memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam industri TPT.

Dominasi peranan kapas dalam industri Indonesia tidak mencerminkan peningkatan produksi kapas nasional. Pada kenyataannya, produksi kapas dalam negeri terbilang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kurun waktu 15 tahun, atau sejak tahun 2004-2014. Industri nasional hanya sanggup menghasilkan kapas per tahun dengan rata-rata 1.400 ton. Jumlah tersebut hanya mewariskan kontribusi sebesar 0,23% dari total kebutuhan kapas nasional. Sedangkan kebutuhan atas bahan baku tekstil berupa kapas dalam negeri saat ini terus meningkat. Peningkatan tersebut mencapai hingga sekitar 900.000 ton per tahun (kemendag.go.id).

Jika dilihat dari sisi perdagangan dengan negara lain, permintaan luar negeri terkait TPT semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan TPT menjadi salah satu industri terpenting di tingkat global yang memiliki permintaan pasar atau tingkat konsumsi yang tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia. TPT merupakan salah satu produk ekspor andalan Indonesia yang mengalami peningkatan permintaan setiap tahunnya. Tingginya permintaan terhadap TPT Indonesia, diikuti pula dengan tingginya kebutuhan terhadap bahan baku kapas.

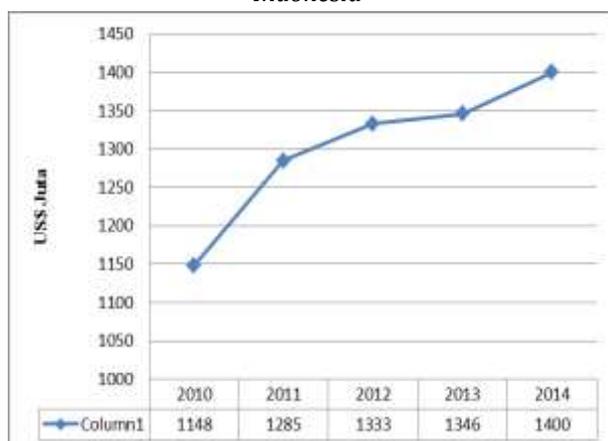
Kemampuan Indonesia dalam menghasilkan kapas terbilang masih terbatas. Indonesia masih belum sanggup memenuhi produksi dalam negeri terkait kapas. Ketidaksanggupan tersebut dilatarbelakangi oleh aspek penggunaan teknologi yang terbilang rendah, serta aspek iklim atau cuaca di Indonesia yang seringkali berubah. Perubahan iklim atau cuaca yang tiba-tiba tersebut menyebabkan petani kapas Indonesia mengalami kesulitan untuk mengembangkan benih kapas dimana proses tersebut membutuhkan teknologi yang canggih dan belum ditemukan di Indonesia. Sehingga, tanaman kapas tidak mampu tumbuh dengan baik di wilayah Indonesia (hasil riset dari salah satu informan di Kementerian Perdagangan).

Ketidaksanggupan Indonesia dalam memproduksi kapas menyebabkan Indonesia mengambil langkah impor agar industri TPT dapat terus berjalan. Nilai impor kapas guna kelangsungan industri TPT masih cukup besar. Ade Sudrajat, sebagai ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menyatakan bahwa hampir 100% kebutuhan industri

Indonesia terkait kapas, dipenuhi melalui impor dari berbagai negara. Negara-negara yang menjadi *supplier* kapas bagi Indonesia yaitu Tiongkok, AS, Brazil, Australia, serta negara lain yang berhasil memproduksi kapas dengan baik (ekonomi.bisnis, 2018).

Nilai impor kapas tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya karena kebutuhan manusia akan produk tekstil juga semakin meningkat. Berikut adalah grafik yang menunjukkan nilai impor kapas:

Grafik 2
Nilai Impor Kapas Untuk Industri TPT
Indonesia



Sumber: BPS (2015)

Dari grafik diatas terlihat bahwa impor kapas yang dilakukan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai impor tersebut di tahun 2010 yaitu sebesar US\$ 1,14 miliar. Sedangkan di tahun 2011, impor kapas mencapai US\$ 1,28 miliar. Nilai impor kapas di tahun 2012 dan 2013 cenderung tidak begitu meningkat yakni sebesar US\$ 13 juta. Pada tahun 2014, nilai impor kapas menyentuh angka US\$ 1,4 miliar. Peningkatan impor kapas yang terjadi didasari oleh kebutuhan bahan baku guna kelangsungan industri TPT Indonesia.

Eksportir kapas terbesar untuk Indonesia diduduki oleh Tiongkok. Hal

tersebut dikarenakan predikat yang dimiliki Tiongkok sebagai produsen kapas terbesar di dunia serta memiliki industri TPT yang terbesar pula. Berdasarkan data yang diperoleh dari *The Observatory of Economic Complexity* (OEC), jumlah ekspor kapas yang dilakukan Tiongkok mencapai US\$ 15 miliar setiap tahunnya (OEC, 2016).

Tiongkok memiliki keunggulan komparatif yang tinggi dalam memproduksi kapas. Pertama, terletak pada biaya produksinya atau *cost comparative advantage*. Tiongkok memiliki produktivitas tinggi melalui penggabungan berbagai faktor produksi seperti tanaman kapas, modal, pemanfaatan tenaga kerja yang banyak serta sistem pengelolaan yang baik. Selain itu, melimpahnya tanaman kapas di Tiongkok menjadi faktor lain yang memberikan produktivitas tinggi pada industri kapas. Maka, Tiongkok mampu memproduksi kapas dengan berlimpah dan dengan harga yang relatif lebih murah (*International Trade Center*).

Kedua, penguasaan teknologi atau *dynamic comparative advantage*. Hanya mengandalkan sumber daya alam berupa tanaman kapas saja tidak cukup, maka Tiongkok mulai menguasai teknologi dalam memproduksi kapas. Peningkatan produksi kapas disebabkan oleh penggunaan serangkaian teknologi pertanian intensif. Penggunaan teknologi pertanian intensif semakin ditingkatkan oleh pemerintah Tiongkok. Teknologi ini termasuk penanaman bibit, *plastic mulching* dan *plant training* yang telah memainkan peran penting terhadap peningkatan serat kapas yang signifikan (*Cotton Research Institute Chinese Academy of Agricultural Sciences*, 2013).

Namun, ditemukan problematika pada perdagangan kapas yaitu harga kapas yang diimpor dari Tiongkok dipatok dengan harga yang cukup tinggi. Mahalnya harga kapas dikarenakan adanya tarif bea masuk yang ditetapkan Indonesia terhadap kapas yang diimpor dari Tiongkok. Sebagai sesama negara anggota ACFTA, Indonesia menetapkan tarif sebesar 5% pada kapas impor dari Tiongkok. Pengenaan tarif sebesar 5% merupakan salah satu bentuk kesepakatan antar anggota ACFTA terhadap tarif impor bahan baku.

Industri TPT Indonesia sangat membutuhkan bahan baku kapas, namun Indonesia justru menerapkan tarif bea masuk terhadap kapas. Realitanya yang terjadi yaitu Indonesia masih belum sanggup untuk memproduksi kapas sehingga Indonesia mengambil langkah impor. Adanya pengenaan tarif bagi bahan baku dalam ACFTA terhadap bahan baku TPT berupa kapas mengakibatkan pelaku industri TPT Indonesia mengalami kesulitan biaya dalam mendapatkan bahan bakunya yang berupa kapas karena harga kapas yang dipatok Tiongkok terbilang cukup tinggi. Kesulitan tersebut dilatarbelakangi oleh pemberlakuan tarif masuk untuk kapas Tiongkok sebesar 5%.

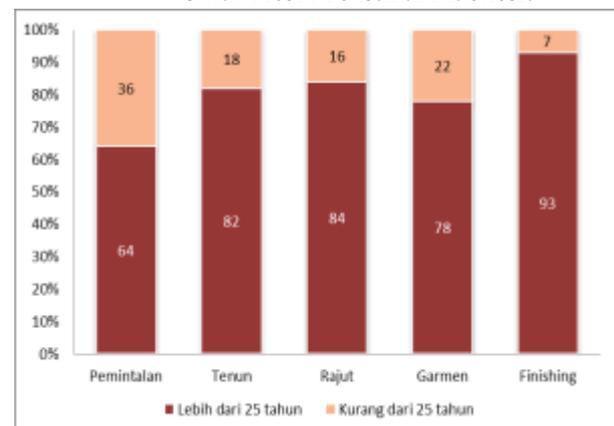
Mesin Produksi yang Sudah Usang

Kondisi mesin merupakan hal yang harus diperhatikan karena turut serta menentukan kualitas komoditas tersebut. Namun, yang menjadi pusat perhatian dalam memproduksi TPT ialah kondisi mesin. Kondisi mesin pada industri TPT Indonesia kerap ditemukan permasalahan. Berdasarkan informasi yang diberikan informan yakni problematika yang dihadapi Indonesia paska ACFTA tidak

hanya tingginya nilai impor TPT saja. Namun, problematika lain yang patut diperhatikan yakni kondisi mesin TPT yang sudah usang.

Kondisi mesin industri TPT Indonesia yang sudah berumur memberikan pengaruh yang nyata bagi produktivitas TPT. Operasional kinerja industri TPT mulai dari hulu hingga hilir menjadi tidak optimal. Hal tersebut berpengaruh pada TPT yang dihasilkan di mana TPT tersebut justru berdaya saing rendah. Sehingga, kondisi mesin menjadi suatu persoalan penting yang harus diperhatikan oleh produsen TPT maupun pemerintah. Sudah berumurnya mesin TPT di Indonesia terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3
Umur Mesin Tekstil di Indonesia



Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Dari grafik di atas terlihat bahwa industri TPT di Indonesia didominasi oleh mesin yang berumur lebih dari 25 tahun. Warna merah pada grafik tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan warna oranye. Tingginya warna merah pada grafik dengan rata-rata persenan pada proses produksi diatas mencapai 80,2% dari seluruh mesin yang dipakai guna memproduksi TPT merupakan mesin tua yang telah berumur lebih dari 25 tahun.

Dominasi mesin tua dalam produksi TPT di Indonesia merupakan salah satu titik lemah bagi industri TPT. Dalam memproduksi TPT secara keseluruhan, *lead time* atau waktu proses yang dibutuhkan sangat lama. *Lead time* tersebut dimulai dari pembuatan sampai distribusi. Terdapat tahapan yang sangat panjang bagi industri untuk menghasilkan TPT karena bahan baku yang digunakan harus impor sehingga memakan waktu produksi. Dalam produksi TPT di negara-negara lain, mereka hanya membutuhkan waktu hanya sekitar 60 hari. Sedangkan dalam proses produksi TPT di Indonesia, *lead time* yang terjadi memakan waktu dua kali lipat dari negara lain atau sampai 120 hari (bisnis tempo).

Sebagai langkah untuk menangani permasalahan pada industri TPT, maka diperlukan adanya restrukturisasi atau modernisasi terkait mesin produksi. Restrukturisasi atau modernisasi merupakan prioritas utama industri TPT di Indonesia karena mesin yang saat ini digunakan sudah berumur lebih dari 25 tahun. Setelah ACFTA diberlakukan sepenuhnya, industri TPT Indonesia mendapatkan imbas di mana pasar nasional Indonesia dibanjiri oleh TPT asal Tiongkok. Hal tersebut mengakibatkan TPT Indonesia kalah saing, sehingga produsen TPT Indonesia perlu melakukan restrukturisasi atau modernisasi mesin produksi guna meningkatkan kualitas TPT.

Sebagai negara yang bukan merupakan produsen mesin, maka Indonesia perlu mengimpor mesin tekstil dari negara lain guna meningkatkan produksi TPT dalam negeri. Tiongkok merupakan salah satu eksportir mesin TPT utama bagi Indonesia. Sekertaris Jenderal

Tiongkok Textile Machinery Association Zhao Xiaogang menyatakan bahwa keunggulan yang dimiliki Tiongkok terakit mesin produksi TPT yaitu *long-staples spindles*, *short-staple spindles* dan *open-end rotors* (Textile Future, 2016). Keunggulan akan peralatan modern itulah yang mendorong efisiensi serta kualitas TPT yang lebih baik. Sehingga, hal tersebut memberikan keberhasilan pada industri Tiongkok dimana ekspor TPT Tiongkok ke berbagai negara semakin meningkat, terutama ke Indonesia.

Sebagai negara produsen TPT terbesar di dunia, Tiongkok telah menguasai teknologi dalam memproduksi TPT. Penguasaan teknologi atau *dynamic comparative advantage* berhasil dimiliki Tiongkok. Hanya mengandalkan sumber daya alam berupa bahan baku saja tidak cukup, maka Tiongkok mulai menguasai teknologi dalam memproduksi TPT. Pertumbuhan mesin produksi disebabkan oleh penggunaan serangkaian teknologi yang canggih. Hal tersebut memberikan dampak nyata berupa peningkatan produksi TPT Tiongkok.

Sedangkan Indonesia masih belum memiliki *dynamic comparative advantage*. Mesin produksi TPT di Indonesia merupakan mesin tua yang sudah berumur lebih dari 25 tahun. Penguasaan teknologi guna memproduksi TPT masih belum dimiliki Indonesia. Pertumbuhan mesin produksi TPT di Indonesia terhambat karena anggaran dana yang diberikan pemerintah tergolong kecil untuk jumlah produsen TPT yang berlimpah. Terlebih lagi Permendag terkait larangan impor barang modal tidak baru yang menghambat kehadiran mesin canggih dari luar negeri.

Adanya perbedaan yang sangat signifikan pada penguasaan teknologi terkait mesin produksi TPT antara Indonesia dan Tiongkok memengaruhi perdagangan TPT kedua negara. Indonesia yang memiliki keterbatasan pada mesin produksinya berimbas pada produktivitas produksi TPT. Operasional kinerja industri TPT mulai dari hulu hingga hilir menjadi tidak optimal. Hal tersebut berpengaruh pada TPT yang dihasilkan di mana TPT tersebut justru berdaya saing rendah. Selain berpengaruh pada kualitas, juga berpengaruh pada kuantitas karena jumlah TPT yang dihasilkan dari mesin tua tidak sebanyak yang dihasilkan oleh mesin canggih seperti yang dimiliki Tiongkok.

Outdated machine yang dimiliki pada industri TPT Indonesia telah menghambat produksi TPT sehingga ekspor yang dilakukan tidak maksimal. Selain itu, dengan kualitas yang dihasilkan menyebabkan konsumen Indonesia tidak tertarik dengan TPT Indonesia. Canggihnya mesin produksi Tiongkok telah menghasilkan TPT yang berlimpah hingga ke pasar domestik Indonesia dengan kualitas yang baik dan mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi dengan hadirnya ACFTA, memberikan kesempatan besar bagi terbukanya keran impor TPT yang masuk ke Indonesia.

Sulitnya Penerapan Standar Nasional Indonesia Bagi Komoditas TPT Indonesia

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pasar nasional dari produk impor yang masuk yakni dengan menerapkan SNI. Pemerintah menganggap penerapan SNI tersebut sebagai langkah jitu dalam mengendalikan

lonjakan produk impor di pasar domestik. SNI diterapkan ke berbagai sektor industri termasuk TPT. Pada sektor TPT, penerapan SNI bertujuan guna menyeleksi ketika ditemukan produk-produk tekstil impor yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan SNI juga dimaksudkan untuk menekan produk TPT impor terutama yang berasal dari Tiongkok.

Penggarapan SNI bagi industri TPT terbilang terlambat karena baru dimulai tahun 2010 saat ACFTA diberlakukan seutuhnya. Sedangkan penurunan tarif dalam ACFTA sudah dimulai sejak tahun 2005 sehingga TPT yang masuk ke Indonesia sebelum tahun 2010 tidak terseleksi dengan baik. Selain itu, terdapat mekanisme lainnya yang mengatur BSN untuk merilis penetapan SNI hanya dua kali dalam setahun. Dengan mekanisme yang berbelit serta cukup panjang tersebut, pemerintah Indonesia seharusnya telah menggarap SNI sebelum ACFTA mulai diberlakukan (bsn.go.id).

Pada tahun 2010, Kementerian Perindustrian telah merekomendasikan sebanyak 266 produk industri TPT Indonesia agar dikenakan SNI. Rekomendasi tersebut disodorkan kepada BSN agar produk tersebut dikenakan SNI yang bersifat wajib. Hasil rekomendasi dari Kementerian Perindustrian terkait penetapan SNI pada 266 produk industri TPT telah dirancang oleh BSN. Namun, penetapan tersebut terkendala dikarenakan berbagai ketentuan penetapan standarisasi belum terpenuhi oleh Indonesia. Sedangkan Tiongkok telah menerapkan standar nasionalnya terkait TPT sejak tahun 2005 sehingga ia lebih

siap menjalankan ACFTA. Akibatnya, TPT impor asal Tiongkok dapat dengan mudah dan terjual bebas di pasar nasional Indonesia karena tidak adanya syarat atau ketentuan yang diberikan Indonesia.

Tiongkok telah membeli beberapa SNI pada produk industri TPT. Pada November 2010, BSN menerima sejumlah uang yang dibayarkan dari pembelian SNI tersebut. Ketika Tiongkok ingin membeli SNI produk industri TPT, BSN tidak bisa menolak tawaran tersebut dikarenakan prosedur jual beli standar diperbolehkan dalam aturan internasional. Jika BSN tidak memberikan SNI yang dibeli Tiongkok, maka dampaknya yakni serangan balasan Tiongkok ketika nanti Indonesia ingin membeli standarisasi Tiongkok.

Pembelian SNI yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan sebagai bukti bahwa Tiongkok siap mengikuti standar yang ditetapkan Indonesia. Hal tersebut sangat berbeda dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Tiongkok. Standar nasional Tiongkok dapat dikatakan sulit bagi TPT Indonesia masuk ke pasar Tiongkok. Pada standarisasi Tiongkok, pengamanan pasar domestik Tiongkok berhasil terjaga untuk melindungi produknya. Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan jual beli standar seperti yang dilakukan Indonesia.

Selain pembelian SNI yang dilakukan Tiongkok, industri TPT Indonesia mengalami permasalahan lain. Para produsen TPT Indonesia, khususnya yang berskala kecil merasa sangat terbebani dengan biaya yang dibutuhkan guna memperoleh sertifikasi SNI. Para pelaku industri TPT harus merogoh biaya yang tinggi pada setiap tahapan pengurusan sertifikasi SNI. Setiap perusahaan TPT di Indonesia harus

mengeluarkan dana sebesar Rp. 14,2 juta guna mendapatkan sertifikat dan logo SNI pada produk TPT. Berikut rincian biaya sertifikasi:

Tabel 1
Rincian Biaya Sertifikasi Produk Berlogo SNI

Keterangan	Biaya (Rp)
Pendaftaran	100.000
Assessment	500.000
Audit Lapangan	7.000.000
Biaya Sertifikat	100.000
Biaya Tim Teknis	4.000.000
Biaya Sertifikasi	1.500.000
Biaya Pengambilan Contoh Produk	1.000.000
Total	14.200.000

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Industri TPT di Indonesia sendiri masih sulit mendapatkan SNI. Hal tersebut terlihat dari kebijakan untuk sektor TPT Indonesia masih belum sinkron. Jika ingin fokus di industri hilir, maka diizinkan masuknya barang modal tidak baru. Jika Indonesia ingin menghambat masuknya impor TPT asal Tiongkok, maka caranya dengan meningkatkan daya saing TPT. Masih belum sinkronnya kebijakan nasional dengan kondisi ekonomi saat ini dikarenakan penerapan standar tinggi yang ternyata industri dalam negeri pun tidak bisa memenuhinya.

Permasalahan itulah yang menyebabkan industri TPT Indonesia belum memperoleh SNI. Sehingga, kualitas TPT yang dihasilkan belum bisa dikatakan baik karena tidak adanya pengujian yang dilakukan BSN terhadap produk tersebut. Ketika TPT yang tidak memiliki SNI dipasarkan di dalam negeri, maka daya saing yang dimilikinya terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan TPT asal

Tiongkok sudah memenuhi SNI karena produksinya sudah modern dan bisa menyesuaikan dengan kriteria yang diminta Indonesia. Sehingga, konsumen Indonesia lebih tertarik dengan TPT Tiongkok.

Sebagai akibat yang ditimbulkan dari permasalahan terkait SNI, permintaan TPT asal Tiongkok di pasar Indonesia semakin meningkat. Keberhasilan Tiongkok memenuhi standar yang ditetapkan Indonesia menyebabkan konsumen Indonesia lebih tertarik TPT Tiongkok karena kualitasnya yang sudah diuji oleh BSN. Hal tersebut membuktikan keunggulan komparatif TPT asal Tiongkok. Ketidakmampuan TPT Indonesia memperoleh SNI sebagai akibat dari tingginya harga sertifikasi SNI menyebabkan tingginya impor terhadap TPT asal Tiongkok. Sehingga, *cost comparative advantage* masih belum dimiliki Indonesia.

Tingginya Suku Bunga Kredit

Dalam perdagangan, sisi permodalan ikut serta memainkan peran penting karena menentukan kekuatan industri terkait. Permodalan pada suatu usaha industri dapat diperoleh melalui pinjaman dari perbankan. Perbankan yang ada di setiap negara menetapkan suku bunga kredit atas pinjaman tersebut. Suku bunga kredit didefinisikan sebagai harga yang wajib dibayar oleh para peminjam kepada bank yang meminjamkan modal tersebut (bi.go.id).

Dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, kedua negara menetapkan suku bunga kredit yang berbeda. Pemerintah Tiongkok menetapkan suku bunga kredit sebesar 4%

hingga 6% per tahun (*World Bank*, 2018). Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan usaha masyarakatnya untuk memproduksi produk. Stabilitas politik nasional Tiongkok menjadi kunci keberhasilan dalam reformasi ekonominya. Pemimpin Tiongkok telah memikirkan dengan matang atau membuat perhitungan terkait ketahanan ekonominya di masa depan dalam situasi ACFTA. Langkah mempertahankan ekonomi untuk stabilitas politik tersebut dilakukan Tiongkok dengan menetapkan suku bunga kredit yang rendah.

Para produsen TPT di Tiongkok dapat dengan mudah memproduksi TPT karena memperoleh pinjaman yang rendah. Tiongkok memiliki produktivitas tinggi melalui penggabungan berbagai faktor produksi seperti bahan baku maupun modal yang didapatkan. Sehingga, TPT yang dihasilkan di Tiongkok pun berlimpah dan dengan harga yang murah. Hal tersebut membuktikan bahwa Tiongkok memiliki *cost comparative advantage*.

Berbeda dengan Tiongkok, suku bunga kredit yang ditetapkan Indonesia sangat tinggi. Angka tersebut mencapai 14% hingga 16% per tahun, lebih tinggi dari suku bunga kredit yang ditetapkan Tiongkok. Suku bunga kredit yang diberlakukan oleh masing-masing bank yaitu berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan setiap bank memiliki wewenang dalam menentukan besarnya suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada peminjam. Meskipun bank menetapkan besarnya suku bunga kredit yang sangat bervariasi, akan tetapi secara garis besar tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah yakni dalam

rentang sebesar 14%-16% (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Paska liberalisasi penuh ACFTA di tahun 2010, ekspor impor TPT antara Indonesia dengan Tiongkok semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya penghapusan hambatan tarif menjadi 0%. Kedua negara semakin giat memproduksi TPT serta melakukan ekspor. Dalam memproduksi TPT, industri tekstil Indonesia maupun Tiongkok memperoleh modal salah satunya melalui kredit. Sehingga, tingkat suku bunga kredit sangat berpengaruh pada produksi industri tersebut.

Dengan tingginya suku bunga kredit di Indonesia memberikan dampak yang nyata bagi iklim usaha di Indonesia. Bagi industri TPT yang berskala kecil maupun menengah, meminjam modal ke bank merupakan alternatif untuk mengembangkan usahanya. Namun, dengan tingginya suku bunga yang ditetapkan akan memengaruhi industri TPT tersebut. Iklim usaha TPT di Indonesia mengalami perlambatan karena harus membayar bunga yang sangat tinggi dan menyulitkan para produsen TPT. Akibatnya, harga TPT Indonesia dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Tiongkok. Hal tersebut membuktikan Indonesia belum memiliki *cost comparative advantage*.

E. Kesimpulan

ACFTA merupakan wujud perdagangan bebas dengan pengurangan maupun penghapusan tarif yang menjadi 0%. Hal tersebut membuka peluang besar bagi produk impor asal Tiongkok untuk masuk ke pasar Indonesia, terutama di sektor TPT. Hubungan perdagangan

Indonesia dengan Tiongkok dalam ACFTA ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Pertama, sulitnya memproduksi kapas sebagai bahan baku TPT menyebabkan harga yang diberikan TPT Indonesia menjadi lebih mahal. Kedua, mesin produksi yang sudah usang. Sekitar 80,2% industri TPT di Indonesia masih menggunakan mesin tua yang berumur lebih dari 25 tahun.

Ketiga, sulitnya penerapan SNI bagi komoditas TPT Indonesia. Terlebih lagi adanya pembelian SNI yang dilakukan oleh Tiongkok dan harga sertifikasi yang tinggi yaitu Rp. 14,2 juta yang memberatkan IKM. Keempat, tingginya suku bunga kredit. Indonesia menetapkan suku bunga kredit sebesar 14% hingga 16% per tahun yang menyebabkan harga jual TPT Indonesia sangat tinggi. Dari keempat tantangan tersebut membuktikan bahwa keunggulan komparatif yang berupa *cost comparative advantage* dan *dynamic comparative advantage* masih belum dimiliki Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, produktivitas industri TPT dalam negeri harus diperkuat lagi dengan mengganti mesinnya atau restrukturisasi mesin sehingga dapat menghasilkan TPT yang berdaya saing tinggi. Selain itu, pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan SNI bagi pelaku usaha TPT di Indonesia. SDM di Indonesia juga harus lebih ditingkatkan, salah satunya dengan pembukaan lembaga pelatihan gratis agar kualitas SDM kian baik yang diikuti dengan penciptaan TPT yang lebih berkualitas.

F. Daftar Pustaka

BUKU

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.

Creswell, J.W. (2014). *Research Methods*. California: SAGE Publications.

Hastedt, Glenn., *et.al.* (2014). *Cases in International Relations: Pathways to Conflict and Cooperation*. California: SAGE.

Salvatore, Dominick. (1997). *Ekonomi Internasional*. Terjemahan oleh Drs. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.

JURNAL

Hermawan, Iwan. (2011). Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.

ARTIKEL

ASEAN-China Free Trade Area. (2016). *ACFTA Business Portal*. Diakses melalui <http://www.aseancn.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=267&id=84> pada 29/8/2019.

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA. (2012). *Kementerian Perdagangan RI*. Diakses melalui <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china> pada 30/8/2019.

Cotton Contamination Surveys. (2016). *International Textile Manufacture Federation*. Diakses melalui <https://www.itmf.org/publications/free-downloads/cotton-contamination-surveys> pada 8/11/2019.

Indonesia Textiles and Clothing. *World Integrated Trade Solution*. Diakses melalui https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2015/TradeFlow/Import/Partner/ALL/Product/50-63_TextCloth pada 20/9/2019.

Laporan Tahunan BI. (2014). *Bank Indonesia*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/E404.aspx?RequestedUrl=https://www.bi.go.id/443/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Default.aspx>

Lending interest rate (%) – China. (2018). *World Bank*. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=CN&view=chart> pada 20/12/2019.

Sejarah. *Asosiasi Pertekstilan Indonesia*. Diakses melalui <http://indonesiatextile.id/sejarah/> pada 3/11/2019.

Suku Bunga Dasar Kredit. (2018). *Otoritas Jasa Keuangan*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-Dasar.aspx> pada 20/12/2019.

